

PENGALOKASIAN DANA BANTUAN SOSIAL PROGRAM PAKET B: SEBUAH UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DASAR

Oleh: Didik Suhardi¹

Email:

Abstract

This research is performed to assess the advantages of Program Paket B in supporting efforts to improve the quality of basic education. Through the empowerment of the Program Paket B, learners are expected to become useful and helpful for the society and the state. In addition, the graduates of Program Paket B are also expected to continue their educations to the higher level as a way to improve Indonesian human resources. This research uses descriptive method with qualitative approach. The results show that the empowerment through the Program Paket B is quite fruitful in helping related government institution to improve the quality of basic education.

Keywords: Program Paket B, Human Resources, Education

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana manfaat Program Paket B dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar. Dengan pemberdayaan Program Paket B, peserta didik diharapkan bisa menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Selain itu, lulusan Program Paket B juga diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Riset ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil yang dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan Program Paket B ternyata sangat membantu pemerintah melalui instansi terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar.

Kata Kunci: Program Paket B, Kualitas Pendidikan Dasar, Pendidikan.

¹ Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdas Kemdikbud
Dosen Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya

Pendahuluan

Pendidikan adalah salah satu usaha sadar dari manusia untuk mengembangkan potensi intelektual, sikap, dan keterampilan. Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan dibutuhkan oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Pendidikan adalah investasi peradaban. Oleh karena itu untuk menggapainya diperlukan sistem yang baik dan terintegrasi dalam kehidupan manusia. Sistem pendidikan merupakan sistem kemasyarakatan yang kompleks dan diletakkan sebagai suatu usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dalam rangka membangun dan mengembangkan (Bela H. Banathy, 1992: 175).

Setiap manusia mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Akan tetapi, hingga saat ini belum semua anak Indonesia berkesempatan menyelesaikan jenjang sekolah formal karena berbagai faktor penyebab, antara lain karena alasan ekonomi, masih kurangnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan, dan faktor dari diri sendiri yang membuat seseorang tidak mau melanjutkan sekolah.

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama mengapa anak harus mengalami putus sekolah atau tidak mampu menamatkan sekolahnya. Beberapa orangtua masih mengutamakan hal-hal yang lain terutama yang sifatnya materialistik daripada pendidikan untuk anak-anaknya. Tidak jarang terjadi kasus, seorang anak harus rela meninggalkan bangku sekolah karena orangtuanya tidak sanggup menanggung biaya pendidikan. Selain itu, masih kurangnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya juga menjadi penyebab serius mengapa masih adanya anak yang putus sekolah atau bahkan tidak sekolah. Peran dan kerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat tentunya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah angka putus sekolah pada khususnya dan masalah pendidikan lainnya pada umumnya.

Di berbagai daerah di Indonesia, masih banyak anak usia sekolah yang terpaksa sudah harus bekerja demi membantu orangtuanya untuk memenuhi hidup dan kebutuhan keluarga daripada belajar di sekolah. Sebagian lagi bahkan tidak merasa bahwa ilmu pengetahuan dan pendidikan bukan menjadi impian yang harus diraih. Pendidikan seolah-olah tidak memberikan nilai tambah dan tidak menjanjikan (Isjoni Ishaq, 2006: 22).

Sesuai dengan amanah konstitusi, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik dan berkualitas. Pemerintah sebagai penyelenggara mempunyai kewajiban untuk menyusun sistem pendidikan yang memberikan ruang gerak bagi warganya untuk terampil, cerdas, dan mandiri. Untuk itu, pemerintah berkewajiban memberikan bantuan kepada setiap warga negara di bidang pendidikan, terutama untuk masyarakat yang kurang mampu (Direktorat Pembinaan SMP, 2011: 2).

Pemerintah melalui kementerian dan dinas terkait telah menggagas dan menyelenggarakan berbagai program untuk mengurangi serta menanggulangi tingginya angka putus sekolah, di antaranya melalui Program Paket B. Program

ini merupakan salah satu program pendidikan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya dengan berbagai macam alasan. Program Paket B adalah program pendidikan yang setara dengan jenjang sekolah menengah pertama (SMP) pada jalur sekolah formal. Dengan diselenggarakannya Program Paket B, diharapkan akan mampu membantu dalam upaya pemberantasan angka putus sekolah yang akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia.

Untuk meningkatkan kualitas dari Program Paket B itu sendiri diperlukan berbagai usaha, salah satunya memberikan bantuan dana sosial untuk lembaga penyelenggara Program Paket B (Direktorat Pembinaan SMP, 2011: 2). Dengan demikian, cita-cita meningkatkan kualitas pendidikan dasar dapat terwujud dengan baik dan bisa mencakup semua lapisan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Perspektif Teoretis

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Potensi diri yang dimaksud meliputi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Ahmad Faizin Karimi, 2012 : 93).

Selain itu, pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, dalam tujuan pendidikan tersebut tercakup keinginan agar peserta didik memiliki kompetensi akademik, kompetensi sosial, kompetensi moral, dan kompetensi spiritual.

Bagaimanapun proses pendidikan tidak hanya terbatas untuk mencapai kemampuan akademik semata, namun juga untuk mewujudkan beberapa tujuan lainnya, termasuk untuk membentuk manusia yang kreatif, berkarakter kuat, dan mempunyai kemampuan yang bisa diandalkan untuk menjadi manusia yang produktif dan mampu bersaing di dunia kerja.

Oleh karena itu, selain melalui jalur pendidikan formal (SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi), pemerintah juga membuka jalur pendidikan nonformal, sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini berpijak dari praduga yang menyatakan bahwa dengan pendidikan manusia sanggup mempertahankan hidupnya serta mengembangkan diri di dalam masyarakat dan lingkungannya (Jusuf A. Feisal, 1995: 26).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 6 Ayat 1 menyebutkan, "Pendidikan nonformal diselenggarakan

bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat". Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan pendidikan nonformal memang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mampu menempuh pendidikan formal.

Dalam Pasal 26 Ayat 2 disebutkan pula bahwa, "Pendidikan nonformal meliputi berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional." Dari sini dapat disimpulkan bahwa melalui pendidikan nonformal diharapkan bisa menghasilkan manusia yang terampil dan profesional dalam menghadapi tantangan zaman.

Pendidikan nonformal bisa berupa pendidikan luar sekolah. Menurut S. Sumarsono (2001: 17), pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah. Meskipun demikian, pendidikan luar sekolah bisa juga diselenggarakan di dalam sekolah meskipun berbeda dengan sekolah formal. Sebagai contoh, proses pembelajaran oleh lembaga pendidikan luar sekolah dapat dilakukan di ruang kelas yang berada di dalam gedung sekolah pada jam-jam tertentu dan tidak bersamaan dengan jam sekolah formal.

Konsep di atas selaras dengan pendapat Johannes B. Banawiratma (1991: 70) yang menyatakan bahwa pengertian pendidikan nonformal mempunyai cakupan yang luas, dapat merupakan kegiatan atau lembaga yang melengkapi pendidikan formal, dapat juga berdiri sendiri. Pendidikan luar sekolah pun bisa berperan sebagai pelengkap pendidikan formal maupun sebagai pengganti pendidikan formal yang berdiri sendiri.

Pada pasal 26 Ayat 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercantum bahwa salah satu yang termasuk pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah adalah pendidikan kesetaraan. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan kesetaraan adalah sarana yang disediakan dalam Sistem Pendidikan Nasional untuk menyetarakan standar pendidikan yang ada di jalur pendidikan nonformal dengan pendidikan formal (Sumardiono, 2007: 69).

Lebih lanjut, Sumardiono (2007: 70) memaparkan bahwa definisi setara dalam pendidikan kesetaraan adalah sepadan dalam *civil effect*, ukuran, pengaruh, fungsi, dan kedudukannya dibandingkan dengan pendidikan formal. Dengan demikian, hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian yang resmi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan merupakan jalur pendidikan nonformal dengan standar formal, tapi konten, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif, yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup dan pelatihan kecakapan hidup dengan berorientasi pada kerja atau berusaha mandiri. Para peserta didik lulusan jalur

pendidikan nonformal diharapkan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dan tangguh dalam menghadapi dunia kerja.

Sesungguhnya pendidikan kesetaraan meliputi 3 (tiga) program, yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C. Program Paket A adalah pendidikan setara dengan SD, Program Paket B adalah pendidikan yang setara dengan SMP, dan Program Paket C setara dengan SMA di jalur pendidikan formal (Sumardiono, 2007: 71).

Dalam konteks penelitian ini, yang akan menjadi pembahasan adalah Program Paket B. Program ini merupakan satuan pendidikan lanjutan SD, atau setara dengan SMP/MTs terpadu antara pendidikan agama, pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan sebagai muatan lokal (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007: 348).

Dalam konteks pendidikan nasional Program Paket B diselenggarakan dengan tujuan agar para peserta didik dapat hidup bermasyarakat dengan baik, dan bagi mereka yang mampu mengikuti kegiatan ini bisa melanjutkan ke SMA, SMK, atau yang sederajat. Dengan kata lain, penyelenggaraan Program Paket B ditujukan untuk memperoleh keterampilan memenuhi dunia kerja (Sumardiono, 2007: 71).

Dengan demikian, peserta didik yang menjadi sasaran untuk mengikuti Program Paket B adalah anak-anak lulusan SD yang tidak bisa melanjutkan ke SMP/MTs, baik negeri maupun swasta. Ada berbagai alasan mengapa mereka tidak melanjutkan pendidikan pada tingkat pertama tersebut, seperti nilai atau NEM yang rendah, kekurangan biaya, dan lain sebagainya. Selain itu, Program Paket B merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat, khususnya pada kelompok usia di atas 18 tahun atau di bawah 18 tahun yang sudah atau pernah menikah, dan tidak dipungut bayaran (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007: 348).

Konsep pembelajaran yang diterapkan di Program Paket B menggunakan sistem tutorial. Adapun materi pelajaran yang diberikan di Program Paket B terangkum dalam kurikulum yang mencakup tiga (3) hal, yaitu pendidikan umum, pendidikan keilmuan dan keterampilan, serta pendidikan individual.

Pertama, Pendidikan umum. Berlaku bagi semua anak dan yang diutamakan adalah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, budaya dan disertai dengan pendidikan wiraswasta.

Kedua, Pendidikan keilmuan dan keterampilan. Terdiri atas pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, dan disertai kemungkinan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, Pendidikan individual. Berupa muatan lokal yang menjadi pilihan perorangan, di antaranya adalah kecakapan tanaman hias, cabe paprika, jahit-menjahit dan bordir, peternakan sapi, domba, dan ayam, makanan khas daerah, mencukur dan perdagangan sayur mayur. Pelaksanaan pendidikan individual dilakukan melalui sistem titip di tempat mitra kerja (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI (2007: 348).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Program Paket B memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dasar karena melalui program ini pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan yang bersifat akademik. Selain itu, Program Paket B berguna untuk mengasah kecakapan hidup (*life skills*), serta menghasilkan kemampuan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan di masyarakat (Direktorat Pembinaan SMP, 2011: 1).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Conny R. Semiawan (2005: 61) penelitian deskripsi merupakan jenis penelitian yang lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada walaupun terkadang diberikan juga interpretasi atau analisis. Akan tetapi, interpretasi yang diberikan harus disampaikan sebagaimana fakta yang sebenarnya, bukan hanya merupakan tafsiran atau asumsi dari peneliti.

Sementara itu penggolongan penelitian ini, menurut Bagja Waluya (2009: 90), didasarkan ke dalam kategori jenis penelitian menurut cara dan taraf pembahasan masalah. Penelitian deskriptif perlu memanfaatkan ataupun menciptakan konsep-konsep ilmiah, sekaligus berfungsi dalam mengadakan suatu spesifikasi mengenai gejala-gejala fisik atau sosial yang dipersoalkan.

Tidak hanya itu, penelitian deskriptif juga harus mampu merumuskan dengan tepat apa yang ingin diteliti dan teknik penelitian apa yang tepat dipakai untuk menganalisisnya. Hasil penelitian deskriptif difokuskan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang sebenarnya dari obyek yang sedang diteliti (Bagja Waluya, 2009: 90).

Sanapiah Faisal (2001: 20) menambahkan penelitian deskriptif bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti. Berbagai variabel itu tidak hanya berkisar pada masalahnya sendiri, melainkan juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah tersebut (W. Gulo, 2002: 19).

Dalam konteks tema yang menjadi judul dalam penelitian ini, yakni "Pengalokasian Dana Bantuan Sosial Program Paket B: Sebuah Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar", maka metode penelitian deskriptif bisa diterapkan. Fenomena sosial bahwa saat ini masih banyak anak Indonesia yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan sekolah dengan berbagai macam alasan, hal ini akan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan dasar.

Penelitian deskriptif juga dapat digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki (M. Nazir, 1999: 63).

Dalam melakukan penelitian deskriptif peneliti harus terfokus pada pemecahan masalah-masalah yang terjadi pada saat sekarang atau aktual. Selain itu, data yang dikumpulkan pertama-tama disusun, kemudian dijelaskan, baru setelah itu dianalisa. Oleh karena itu, metode penelitian deskriptif sering juga disebut sebagai metode penelitian analitik karena membutuhkan tahap analisis dalam proses penelitiannya (Winarno Surakhmad, 1998: 140).

Penelitian deskriptif ini akan menjadi lebih lengkap lagi apabila didukung oleh pendekatan yang bersifat kualitatif. Isaac Prilleltensky dan Dennis Fox (1997: 174) menyebut pendekatan kualitatif sebagai pendekatan secara alamiah, yaitu sebuah metode pendekatan penelitian yang secara khusus sangat tepat untuk menggambarkan dan memahami perilaku sosial dalam lingkungan alamiahnya. Pendekatan kualitatif dapat diterapkan dengan beberapa cara, antara lain wawancara mendalam, wawancara terbuka, pengamatan ilmiah, studi kasus, dan analisis dokumen.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif yang diterapkan adalah memakai metode analisis dokumen, yaitu dengan mencermati dan mengulas sumber atau referensi yang berasal dari kumpulan dokumen. Dokumen ini merupakan data yang boleh dikatakan valid karena telah berupa laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan di lapangan.

Pendekatan kualitatif berorientasi induktif dan menemukan (*discovery*). Metode dengan pendekatan ini memperbolehkan suatu penelitian tentang perilaku sosial yang terjadi di lingkungan alamiahnya. Pendekatan kualitatif juga memberikan kesempatan kepada obyek yang diteliti untuk mengekspresikan dirinya secara lebih utuh dan pendekatan itu memberikan gambaran yang lebih kaya tentang berbagai variabel yang dapat mempengaruhi interaksi sosial (Achmad Chusairi, *ed.*, 2005: 175).

Sesuatu yang hendak ditemukan dalam suatu gejala, peristiwa, kejadian, fakta, atau fenomena yang akan diteliti merupakan hal unik dalam penerapan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengalaman sehari-hari yang tampak biasa, lumrah, atau sering dikatakan sebagai *as usual* ternyata memiliki arti tertentu bila diteliti dengan lebih mendalam (Conny R. Semiawan, 2005: xii).

Hal di atas ternyata juga berlaku dalam konteks tema atau judul penelitian ini. Bagi sebagian masyarakat di pedesaan atau penduduk yang masih tinggal di daerah pedalaman, anak yang putus sekolah atau bahkan tidak sekolah sudah menjadi hal yang biasa. Paling tidak, seorang anak hanya "wajib" bersekolah sampai bisa baca dan tulis saja, selanjutnya mereka diorientasikan untuk bekerja demi membantu pendapatan keluarga.

PEMBAHASAN

Program Paket B merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan kebodohan dengan memberikan layanan pendidikan yang setara dengan jenjang SMP untuk mereka yang tidak mampu melanjutkan sekolah

karena berbagai alasan. Untuk mendukung terlaksananya Program Paket B dengan baik dalam proses maupun hasil belajarnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengalokasikan bantuan dana Bantuan Sosial (Bansos).

Kegiatan ini bertujuan agar kualitas pembelajaran pada Program Paket B menjadi lebih baik lagi, termasuk pula lulusan yang dihasilkan nanti. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas pembelajaran menjadi salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut D.R Cruickshank (1990: 11), fasilitas pembelajaran yang mempengaruhi kualitas proses pendidikan adalah ukuran kelas, luas ruang kelas, suhu udara, cahaya, suara, dan media pembelajaran.

Apabila proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dengan didukung oleh fasilitas pembelajaran yang baik pula, maka kualitas peserta didik pun akan mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Stringer (1998, h. 417) menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran menyumbang 42 persen terhadap keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, melalui pemberian dana Bansos diharapkan mutu pembelajaran Program Paket B akan meningkat dan menghasilkan lulusan yang baik pula.

Dana Bansos Penyelenggaraan Program Paket B yang dialokasikan adalah berupa Bansos Pendidikan Berbasis Keterampilan Kewirausahaan dan Bansos Pendidikan Layanan Khusus untuk peserta didik Program Paket B. Kemdikbud akan menyalurkan dana bantuan sosial ini melalui Lembaga Penyelenggara Program Paket B yang memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Oleh karena itu, Kemdikbud telah membentuk tim visitasi yang akan melakukan kunjungan langsung untuk memastikan kesiapan dan kelayakan Lembaga Penyelenggara Program Paket B yang akan menjadi penyalur dana bantuan sosial tersebut. Kunjungan atau kegiatan visitasi ini dilakukan di berbagai daerah yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia.

Tim visitasi terdiri dari pejabat, konsultan, tim teknis, dan staf di lingkungan Direktorat Pembinaan SMP. Para calon petugas yang akan disertakan ke dalam tim visitasi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu (1) memiliki wawasan dan memahami kebijakan program Kemdikbud, khususnya yang berkaitan dengan Program Paket B; (2) mampu berkomunikasi secara aktif dalam pengumpulan data dan penyusunan laporan; dan (3) memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan visitasi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan visitasi meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umumnya adalah untuk mengetahui kondisi obyektif kesiapan lembaga calon penerima Bansos Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan dan Bansos Pendidikan Layanan Khusus untuk peserta didik Program Paket B. Sedangkan tujuan khusus dari pelaksanaan kegiatan visitasi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui kondisi kelembagaan, manajemen, dukungan sarana dan prasarana, serta kondisi lingkungan di sekitar lembaga.
2. Memberikan bimbingan untuk menjaga komitmen dan konsistensi pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan dan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh lembaga sehingga dapat mencapai keberhasilan.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan visitasi ini adalah diperolehnya data dan informasi mengenai keberadaan lembaga penyelenggara yang masih aktif dan melaksanakan Program Paket B. Selain itu, juga diharapkan diperolehnya data yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, sumber dana lembaga penyelenggara Program Paket B, serta rencana realisasi pelaksanaan program bantuan sosial.

Kegiatan kunjungan ini juga telah menetapkan sasaran bagi lembaga calon penerima Bansos Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan dan Bansos Pendidikan Layanan Khusus untuk peserta didik Program Paket B. Adapun sasaran yang dimaksud adalah Lembaga Penyelenggara Program Paket B yang telah mengajukan proposal untuk memperoleh Bansos untuk Program Paket B. Ketua Lembaga Penyelenggara Program Paket B juga menjadi sasaran yang dituju.

Lembaga calon penerima dana bantuan sosial wajib mengajukan proposal untuk dinilai dan diseleksi melalui beberapa tahapan tertentu oleh tim visitasi. Selain itu, Lembaga Penyelenggara Program Paket B juga harus memenuhi aspek yang akan menjadi pertimbangan sebelum dilaksanakannya kegiatan visitasi oleh tim Kemdikbud. Adapun aspek-aspek tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, antara lain: Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan organisasi sejenis lainnya.
2. Lembaga-lembaga calon penerima dana bantuan sosial harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah: (a) memiliki legalitas lembaga dari Kantor Notaris atau telah memiliki Akta Notaris Pendirian Lembaga; (b) memiliki Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota, atau dari Kantor Kementerian Agama di wilayah masing-masing; (c) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga, dan (d) memiliki rekening bank atas nama lembaga.
3. Kondisi obyektif dan kelayakan lembaga, yang mencakup: identitas lembaga, sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, Program Pembelajaran Akademik, Program Pembelajaran Keterampilan, serta sumber pendanaan lembaga.

Sebanyak 194 Lembaga Penyelenggara Program Paket B yang tersebar di 22 provinsi di Indonesia telah mendapat kunjungan. Adapun rinciannya adalah 137 lembaga untuk Bansos Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan dan 57 lembaga untuk Bansos Pendidikan Layanan Khusus.

Lembaga Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan diperbolehkan mengajukan usulan mengenai jenis keterampilan yang akan menerima alokasi dana bantuan sosial. Beberapa jenis keterampilan yang bisa diusulkan tersebut antara lain: tata boga, tata busana, tata rias, kerajinan, membatik, tenun tradisional, perbengkelan, dan pertanian.

Untuk berbagai jenis keterampilan yang terdapat di Lembaga Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan itu, Kemdikbud telah menerima sebanyak 233 proposal. Setelah dilakukan penilaian dan seleksi, terdapat 137 proposal yang dinilai layak untuk ditindaklanjuti dan dinyatakan lolos untuk dilakukan visitasi.

Sedangkan bantuan sosial untuk Lembaga Pendidikan Layanan Khusus akan diberikan kepada lembaga penyelenggara Program Paket B yang menangani peserta didik yang berada di daerah terpencil, pedalaman, pegunungan, pesisir pantai, terisolir, perbatasan, serta daerah transmigrasi. Untuk kategori ini, Kemdikbud telah menerima sebanyak 94 proposal. Setelah dilakukan penilaian dan proses seleksi, sebanyak 57 proposal dinilai layak untuk ditindaklanjuti dan dinyatakan lolos untuk dilakukan visitasi, sedangkan 37 proposal dinilai tidak layak berdasarkan berbagai pertimbangan tertentu.

Hasil dari program penyaluran Bansos ini, seperti yang tercantum dalam Laporan Hasil Visitasi Lembaga Calon Penerima Bantuan Sosial Program Paket B, adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan visitasi terhadap 137 lembaga yang telah lolos dalam tahap penilaian proposal, dinyatakan bahwa terdapat 119 lembaga yang dinilai layak untuk menerima Dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan, sedangkan 18 lembaga lainnya dinilai tidak layak.
2. Setelah dilakukan visitasi terhadap 57 lembaga yang telah lolos dalam tahap penilaian proposal, dinyatakan bahwa terdapat 53 lembaga yang dinilai layak untuk menerima Dana Bantuan Sosial Pendidikan Layanan Khusus, sedangkan empat (4) lembaga lainnya dinilai tidak layak.

Seluruh lembaga yang telah dinyatakan berhak menerima dana Bansos, yaitu 119 Lembaga Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan dan 53 Lembaga Pendidikan Layanan Khusus diundang untuk mengikuti program bimbingan teknis, yaitu Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan untuk Lembaga Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan, dan Bimbingan Teknis Pendidikan Penyelenggaraan Program Paket B untuk Lembaga Pendidikan Layanan Khusus.

Simpulan

Demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah perlu lebih memperhatikan aspek pendidikan. Salah satu masalah terjadi dalam dunia pendidikan nasional adalah masih tingginya angka putus sekolah dan kesadaran masyarakat untuk memberikan pendidikan yang baik dan

berkualitas bagi anak-anaknya. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan penyelesaiannya.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kemdikbud merancang berbagai program untuk mengentaskan kebodohan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyelenggarakan Program Paket B. Bagaimana pun Program Paket B sudah sepatutnya digalakkan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan yang setara dengan jenjang sekolah menengah tingkat pertama. Para peserta didik Program Paket B nantinya diharapkan mampu menempatkan dirinya dengan layak di tengah-tengah masyarakat dan menjadi orang yang kreatif, mandiri, inovatif, kompeten, dan profesional dalam kerasnya persaingan dunia kerja.

Untuk semakin memperlancar dan meningkatkan kualitas Program Paket B, baik dari sisi proses maupun hasil belajarnya, di seluruh wilayah Indonesia, maka Kemdikbud telah mengalokasikan dana bantuan sosial atau bansos. Dana bantuan sosial ini berupa Bansos Pendidikan Berbasis Keterampilan Kewirausahaan dan Bansos Pendidikan Layanan Khusus untuk peserta didik Program Paket B.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kemdikbud melakukan kegiatan visitasi untuk menentukan lembaga mana saja yang berhak menerima dana bantuan sosial demi meningkatkan kualitas pembelajaran Program Paket B di berbagai daerah di Indonesia. Dengan pemberian bantuan ini diharapkan lembaga penyelenggara Program Paket B mampu meningkatkan kualitasnya dan pada akhirnya menghasilkan para peserta didik dengan sumber daya manusia yang dapat diandalkan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat serta berguna bagi bangsa dan negara.

Program paket B tetap diperlukan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang tidak sempat mengenyam di pendidikan formal/reguler.

Daftar Pustaka

Achmad Chusairi, *ed.*, 2005. *Psikologi Kritis: Metaanalisis Psikologi Modern*.

Jakarta: Teraju.

Ahmad Faizin Karimi, 2012. *Think Different: Jejak Pikir Reflektif Seputar*

Intelektualitas, Humanitas, dan Religiusitas. Gresik: Muhipress.

Bagja Waluya, 2009. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*.

Jakarta: Grafindo Media Pratama.

- Banathy, Bela H., 1992. *A Systems View of Education: Concepts and Principles for Effective Practice*. Englewood Cliffs: Educational Technology.
- Conny R. Semiawan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Cruickshank, D.R., 1990. *Research that Informs Teacher and Teacher Educators*. Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2011. *Laporan Hasil Visitasi Lembaga Calon Penerima Bantuan Sosial Program Paket B*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional.
- Isjoni Ishaq, 2006. *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Johannes B. Banawiratma, 1991. *Iman, Pendidikan, dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Jusuf A. Feisal, 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- M. Nazir, 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Prilleltensky, Isaac & Fox, Dennis, 1997. *Critical Psychology: An Introduction*. London: Sage Publication.
- S. Sumarsono, 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Stringer, M., 1998. "Students Evaluations of Teaching Effectiveness: A Structural Modelling Approach", dalam *British Journal of Educational Psychology*, Vol. 68, Part. 3.
- Sumardiono, 2007. *Homeschooling: Lompatan Cara Belajar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Surakhmad Winarno, 1998. *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar, Metode, Teknik)*. Bandung: Tarsito.
- Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007. *Ilmu & Aplikasi Pendidikan*. Bandung: IMTIMA.
- W. Gulo, 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Grasindo.

